

MANAJEMEN SEKOLAH INKLUSI DI SD NEGERI BABATAN V SURABAYA

Nur Mita Apriastuti 091714229

Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: Shelowmytha@yahoo.com

Karwanto

Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: karin_haidar@yahoo.com

Abstrak: Berdasarkan tujuan pendidikan untuk semua (education for all) yang menyatakan bahwa semua orang tak terkecuali anak berkebutuhan khusus mempunyai hak (human right) yang sama untuk memperoleh manfaat dari proses pendidikan dan pemerintah berkewajiban untuk menjamin tujuan pendidikan untuk semua tersebut dalam wujud sekolah inklusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang: (1) Pembinaan Profesi Guru Pembimbing Khusus Sekolah Inklusi di SD Negeri Babatan V Surabaya, (2) Peran Kepala Sekolah dalam Upaya Peningkatan Manajemen Sekolah Inklusi di SD Negeri Babatan V Surabaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dan menggunakan rancangan penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan, (1) Wawancara mendalam, (2) Observasi non partisipan, (3) Studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau simpulan. Keabsahan data diuji dengan menggunakan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Temuan penelitian dari penelitian ini. Pertama, pembinaan pofesi guru pembimbing khusus di SD Negeri Babatan V Surabaya, yaitu: 1) Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), meliputi: a) Guru pembimbing khusus membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Silabus integrasi yang dimodifikasi untuk siswa berkebutuhan khusus, b) Guru pembimbing khusus tidak membuat Program Pembelajaran Individual (PPI) untuk siswa berkebutuhan khusus, 2) Pelaksanaan pembelajaran, meliputi: a) Guru pembimbing khusus lebih menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Silabus yang dimodifikasi dan media di dalam kelas, b) Peran Guru pembimbing khusus lebih sebagai pendamping siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas, 3) Evaluasi Guru pembimbing khusus terhadap siswa berkebutuhan khusus, meliputi: a) Guru pembimbing khusus melakukan modifikasi sistem evaluasi dengan bantuan guru kelas, b) Pelaporan hasil evaluasi siswa berkebutuhan khusus berupa raport orange. Kedua, peran kepala sekolah dalam upaya meningkatkan manajemen sekolah inklusi di SD Negeri Babatan V Surabaya, yaitu: 1) Administrator sekolah inklusi, meliputi: a) Kepala sekolah menjalin hubungan yang harmonis dengan semua tenaga kependidikan, b) Kepala sekolah mampu membagi tugas tenaga kependidikan sesuai jabatannya; 2) Supervisor pembuatan administrasi guru, meliputi: a) Kepala sekolah menggunakan pembicaraan individual dalam memberikan supervise, b) Kepala sekolah berupaya meningkatkan pembinaan profesi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi

Kata Kunci: *manajemen sekolah inklusi, pembinaan profesi guru pembimbing khusus, peran kepala sekolah sebagai administrator, peran kepala sekolah sebagai supervisor*

Abstract: Based on the goal of education for all, all people including children with special needs have the equal human rights to get the benefits of the education process and the government has the obligation to make sure of the implementation of the goal of education for all through the inclusive schools. This study aimed at knowing and describing about: (1) The supervision of the profession of Special Supervisor Teacher in SD Negeri Babatan V Surabaya Inclusive School, (2) The roles of the school headmaster in an endeavor of improving the management of the inclusive school in SD Negeri Babatan V Surabaya. Qualitative method using case study design was employed in this study. The data collection techniques used were, (1) In-depth interview, (2) Non participatory observation, (3) Documentary study. Data analysis in this study used data reduction, data report and verification or conclusion. The validity of the data was tested using credibility, transferability, dependability and conformability. The results of this study showed that first, the supervision of the profession of special supervisor teacher in SD Negeri Babatan V Surabaya, were: 1) The process of making the lesson plan, covered: a) The special supervisor teacher made the lesson plan and integrated syllabus that was modified for students with special needs, b) The special supervisor teacher did not make Individual Learning Program for the students with special needs, 2) The implementation of the teaching and learning process, covered: a) The special supervisor teacher used the lesson plan and the modified syllabus along with the media used in the classroom, b) The role of the special supervisor teacher was emphasized on assisting the students with special needs inside the classroom, 3) The evaluation given by the special supervisor teacher towards the students with

special needs, covered: a) The special supervisor teacher did the modification on the evaluation system with the help of the classroom teacher, b) The report of the evaluation result of the students with special needs was given in a form of orange report card. Second, the roles of the school headmaster in an endeavor of improving the management of SD Negeri Babatan V Surabaya Inclusive School, were: 1) The administrator of the inclusive school, covering: a) The school headmaster established a good relationship with all the education practitioners, b) The school headmaster was able to divide the duty of the education practitioners based on the positions occupied; 2) The supervisor of the making of the teachers' administration, covering: a) The school headmaster made use of the individual conversation in giving the supervision, b) The school headmaster tried to improve the profession supervision through the cooperation with the universities.

Keywords: inclusive school management, special supervisor teacher profession supervision, school headmaster's role as the administrator, school headmaster's role as the supervisor

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun disemangati oleh *International Education For All (EFA)* yang dikumandangkan UNESCO pada tahun 2000 di Dakar Sinegal sebagai kesepakatan global hasil *World Education Forum* bahwa penuntasan EFA diharapkan tercapai pada tahun 2015. Indonesia termasuk dalam kesepakatan ini.

Sementara itu pemerataan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus dilandasi pernyataan Salamanca tahun 1994. Pernyataan Salamanca ini merupakan perluasan tujuan *Education For All* dengan mempertimbangkan pergeseran kebijakan mendasar yang diperlukan untuk menggalakkan pendekatan pendidikan inklusi. Demikian juga diperkuat oleh Deklarasi tentang Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif yang dicetuskan di Bandung 11 Agustus 2004.

Dalam tujuan pendidikan untuk semua (*education for all*) menegaskan bahwa semua anak, remaja dan orang dewasa tak terkecuali anak berkebutuhan khusus mempunyai hak (*human right*) yang sama untuk memperoleh manfaat dari proses pendidikan. Pemerintah di setiap negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa tujuan dan target pendidikan untuk semua bisa tercapai dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara

mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Sebelumnya pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 5 Ayat 1 telah dijelaskan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Selanjutnya diperjelas oleh pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa warga negara yang baik memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan. Namun dalam implementasinya kebijakan pendidikan di Indonesia sampai sekarang belum mampu menjangkau semua anak usia sekolah untuk mendapatkan akses pendidikan secara memadai terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang belum terpenuhi haknya untuk memperoleh pendidikan sebagaimana layaknya anak-anak lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2008 menunjukkan bahwa total anak berkebutuhan khusus (ABK) 1.544.184 anak dan diprediksi bahwa sensus nasional tahun 2010, angka anak-anak berkebutuhan khusus (5-18 tahun) adalah 21,42% dari jumlah ABK dengan berbagai kekurangan/kecacatan 330.764 anak. Angka anak berkebutuhan khusus yang sudah

mendapatkan layanan pendidikan di sekolah khusus (Sekolah Luar Biasa) dan/atau di sekolah inklusi, dari jenjang Taman kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Pertama hanya 85.737 anak (25,92%). Artinya, ada 245.027 (74,08%) anak dengan kebutuhan khusus yang belum mendapatkan layanan pendidikan di seluruh Indonesia dengan berbagai jenis kelainan dan sebagian besar berada di pedesaan dan pusat-pusat perkotaan (Mudjito, 2012:12).

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur mengenai Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Mengenai penjelasan pendidikan khusus dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Sedangkan implementasinya dijabarkan melalui Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 menyebutkan pendidikan inklusi di definisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik baik yang berkebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Yang termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (2010), dapat dikelompokkan menjadi: (1) Tunanetra; (2) Tunarungu; (3) Tunadaksa; (4) Anak berbakat/anak yang memiliki kecerdasan luar biasa; (5) Tunagrahita; (6) Anak lamban belajar; (7) Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik (disleksia,

disgrafia atau diskalkulia); (8) Anak yang mengalami gangguan komunikasi; (9) Tunalaras; dan (10) Anak yang termajinalkan.

Untuk mempercepat pemenuhan hak pendidikan maka pendidikan inklusi perlu dikembangkan. Pemberian hak dan kebebasan belajar bagi setiap anak bangsa membuka peluang bagi mereka yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan siswa reguler (normal) di sekolah reguler yang biasa disebut sekolah inklusi.

Pengelolaan sekolah inklusi tentu berbeda dengan sekolah biasa, diantaranya dilihat dari segi manajemennya. Sampai saat ini manajemen sekolah di sekolah inklusi pelaksanaannya masih mengacu kepada sistem manajemen sekolah yang sudah ada, yaitu model manajemen yang biasa digunakan di sekolah-sekolah reguler. sehingga perlu adanya modifikasi dalam manajemen sekolah inklusi. Sesuai dengan pernyataan Tarmansyah (2007:144) yang menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada manajemen organisasi yang khusus untuk pendidikan inklusi di Indonesia, maka dari itu untuk menyesuaikan program kegiatan sekolah dilakukan modifikasi yang sifatnya praktis dan fleksibel di sekolah inklusi tersebut.

Bersamaan dengan upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan disini, faktor tenaga pendidik (guru) memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian kualitas pendidikan secara umum. Kondisi ini dimungkinkan karena posisi guru sangat dominan dalam berinteraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Pada sekolah inklusi, guru pembimbing khusus mempunyai peran penting dalam memberikan pembelajaran dan memberikan pelayanan terhadap siswa berkebutuhan khusus.

Sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan diantaranya Kepala sekolah, Pendidik dan Tenaga kependidikan.

Dalam Manajemen sumber daya manusia pendidikan, guru adalah kekayaan (*asset*) utama sekolah, sehingga harus dikelola dengan baik dan profesional. Di SD Negeri Babatan V Surabaya ini memiliki 13 jumlah guru pembimbing khusus dan hanya 2 guru pembimbing khusus yang status pendidikannya pendidikan luar biasa/khusus. Berdasarkan Astuti (2011:96), Guru pembimbing khusus merupakan lulusan Pendidikan Luar Biasa atau S1 Psikologi atau S1 Kependidikan yang telah memperoleh pelatihan intensif dalam pendidikan khusus atau pernah mengajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam kelas pendidikan khusus.

Sehubungan dengan minimnya Guru Pembimbing Khusus yang memiliki kompetensi memadai, maka perlu diadakan pembinaan. Pembinaan disini lebih mengarah pada pembinaan profesi berupa penyetaraan, sertifikasi, pelatihan ataupun penataran untuk lebih mengenal dan lebih memahami siswa berkebutuhan khusus serta bertujuan untuk peningkatan profesional dan kinerja guru pembimbing khusus di dalam kelas. Pembinaan terhadap guru pembimbing khusus perlu didukung oleh peran aktif Kepala sekolah, karena efektifitas Kepala sekolah tidak akan terwujud tanpa sistem mekanisme kerja yang jelas dan didukung sumber daya manusia yang profesional.

Untuk mendalami kajian siswa-siswa berkebutuhan khusus dapat dilakukan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Kelompok Kerja Pengawas, dibawah koordinasi Kepala Cabang Dinas atau Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, yang dilakukan secara rutin dengan menggunakan strategi yang inovatif sehingga menumbuhkan kreatifitas para pesertanya.

Dari beberapa pembinaan-pembinaan yang diikuti oleh guru pembimbing khusus tersebut

harusnya memberikan perubahan yang lebih baik lagi , antara lain dalam hal: pembuatan RPP, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi GPK terhadap siswa berkebutuhan khusus. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ini digunakan oleh guru pembimbing khusus sebagai persiapan mengajar untuk satu atau dua kali pertemuan di kelas, sedangkan silabus tersebut adalah penjabaran standart kompetensi dan kompetensi dasar kedalam pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian dan di buat untuk satu semester. Selain RPP dan silabus, guru pembimbing khusus juga menyediakan Program Pembelajaran Individual (PPI) yaitu program pembelajaran yang dibuat oleh guru pembimbing khusus karena kemampuan siswa jauh dari teman sekelasnya dan sulit mengikuti pembelajaran dengan kurikulum yang dimodifikasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah inklusi salah satunya SD Negeri Babatan V Surabaya ini, yang memiliki dua kelas yaitu kelas reguler dan kelas *resource room* (konseling) dan terdiri dari peserta didik anak-anak normal dan berkebutuhan khusus diantaranya anak *slow learn*, maka diperlukan guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pembimbing khusus (GPK). Dalam kelas reguler, guru pembimbing khusus bertugas sebagai pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran dalam melayani anak berkebutuhan khusus, sama halnya tugas guru pembimbing khusus (GPK) pada kelas konseling yaitu mendampingi siswa berkebutuhan, mengoptimalkan penggunaan media dalam proses pembelajaran, agar potensi yang dimiliki siswa berkebutuhan khusus dapat berkembang secara optimal.

Selanjutnya dalam evaluasi guru pembimbing khusus terhadap siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas berupa raport. Pada kelas reguler, siswa berkebutuhan khusus menerima raport

orange dan raport merah yang diberikan di akhir semester, selain itu guru pembimbing khusus berkerjasama dengan guru kelas dan guru pembelajaran dalam memberikan evaluasi terhadap siswa berkebutuhan tersebut, sedangkan untuk siswa berkebutuhan khusus di kelas konseling/inklusi berupa raport orange yang diberikan di akhir semester dan hanya guru pembimbing kelas yang memberikan penilaian terhadap siswa berkebutuhan khusus tersebut.

Dalam sekolah inklusi, kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pengendali kelancaran pengelolaan sekolah inklusi atau administrator, melainkan sebagai pemimpin yang bertanggungjawab memberikan supervisi (bimbingan) dalam pembuatan administrasi terhadap guru. Oleh karena itu diperlukan seorang Kepala sekolah sebagai pemimpin yang berpandangan luas dan berkemampuan, baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap mengenai pendidikan inklusi.

Menurut Tarmansyah (2007:144), bahwa: Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Sumber daya yang profesional akan mampu mengelola organisasi sekolah secara baik. Mengelola kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik masing-masing siswa, pembinaan sumber daya tenaga kependidikan yang handal, sarana prasarana yang memadai dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan membina kerjasama kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha yang ada. Tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan dana yang sesuai dengan fungsinya.

Apabila salah satu komponen tersebut diatas tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pengelolaan manajemen sekolah akan menjadi

kurang efektif. Hal tersebut akan mengakibatkan hasil yang diharapkan menjadi kurang optimal.

Peneliti tertarik untuk meneliti sekolah ini karena memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola manajemen sekolah, yang awalnya sekolah ini adalah sekolah dasar negeri dan kemudian pada tahun 2009 menjadi sekolah inklusi, selain itu terlihat dari banyaknya orang tua siswa yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah inklusi ini daripada di sekolah luar biasa, mengingat biaya di sekolah inklusi luar biasa cukup besar serta jarak antara rumah dengan sekolah luar biasa yang cukup jauh.

Selebihnya, peneliti memilih SD Negeri Babatan V Surabaya sebagai objek penelitian, yaitu dengan alasan sebagai berikut: *Pertama*, SD Negeri Babatan V Surabaya merupakan salah satu SD Inklusi pada tahun 2012 yang mampu menampung siswa berkebutuhan khusus (ABK) terbanyak sewilayah Surabaya yaitu berjumlah 82 anak, dengan pembagian 32 anak ditempatkan pada kelas konseling, sedangkan sisanya 44 anak ditempatkan di kelas reguler bersama siswa-siswa reguler. *Kedua*, prestasi yang telah diraih oleh siswa berkebutuhan khusus SD Negeri Babatan V Surabaya mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, diantaranya: Juara I dalam Lomba Tari Remo SD Pentas Seni Se-Kota Cam.Wiyung Surabaya dan Juara III *Trofeo Basic Futsal Academy BFA Cup* pada tahun 2012. *Ketiga*, Kepala sekolah SD Negeri Babatan V Surabaya dalam Forum Kepala Sekolah Inklusi Surabaya menjabat sebagai Sekretaris Sekolah Inklusi Sewilayah Surabaya. *Keempat* mengenai Peningkatan kualitas pendidik (Guru Pembimbing Khusus) melalui diklat/penataran dan *workshop*, Selanjutnya *Kelima* Kemampuan yang dimiliki oleh Kepala sekolah dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah inklusi,

diantaranya Kerjasama dengan Puskesmas tentang imunisasi anak.

Dengan adanya sekolah inklusi akan menjamin bahwa strategi nasional “Pendidikan Untuk Semua” benar-benar dimiliki semua kalangan tanpa membedakan antara anak yang berkebutuhan khusus atau tidak serta diharapkan melalui peran serta masyarakat, kepala sekolah, guru, petugas administrasi sekolah, orang tua agar mampu mendorong sekolah-sekolah reguler dalam melayani semua anak, terutama anak yang memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai, “Manajemen Sekolah Inklusi di SDN Babatan V Surabaya”.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data dan sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data dari hasil wawancara mendalam kepada informan, dan data-data lainnya berupa dokumentasi arsip-arsip serta foto-foto yang menunjang data utama. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif. Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam temuan penelitian ini, jelas bahwa pembinaan profesi guru pembimbing khusus sekolah inklusi di SD Negeri V Surabaya dapat diteliti dari Pembuatan RPP, Pelaksanaan Pembelajaran, dan Evaluasi GPK terhadap siswa berkebutuhan khusus.

Sesuai dengan tuntutan pengembangan kurikulum, guru harus menguasai berbagai kemampuan, diantaranya kemampuan menyusun RPP dan Silabus.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sagala (2010:123) tentang kemampuan yang harus dikuasai oleh guru salah satu pengembangan kurikulum yang perlu dikuasai oleh guru adalah kemampuan menyusun silabus yang mengacu pada standar isi dan menyusun RPP mengacu pada silabus yang telah disusunnya.

Lebih lanjut Direktorat PLB 2010 mengenai pengertian RPP dan silabus] tersebut adalah Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana pembelajaran atau persiapan mengajar yang dibuat untuk satu atau dua kali pertemuan oleh guru. Komponen-komponen yang dituliskan dalam RPP kurang lebih sama dengan silabus. Bedanya dengan silabus adalah RPP dibuat tidak dalam bentuk tabel tetapi uraian yang memanjang ke bawah dan jika silabus dibuat untuk satu semester, maka RPP dirancang hanya untuk satu atau dua kali pertemuan. Oleh karenanya, uraian rencana kegiatan dalam RPP biasanya lebih rinci/detail daripada silabus.

Pada sekolah inklusi, tentu dalam pembuatan RPP dan Silabus berbeda dengan sekolah umumnya. Di SD Negeri Babatan V Surabaya, Guru pembimbing khusus telah membuat RPP dan silabus sesuai dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus yaitu dengan melakukan modifikasi-modifikasi.

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Direktorat PLB (2010:94) tentang modifikasi silabus untuk siswa berkebutuhan khusus karena pertimbangan kemudahan bagi guru maka untuk saat ini yang dimodifikasi hanya komponen dari silabus, diantaranya: (1) materi (2) indikator,

(3) kegiatan pembelajaran, (4) media dan sumber, (5) evaluasi kebutuhan khusus

Selain pembuatan RPP dan Silabus, Guru pembimbing khusus perlu merancang PPI dirancang untuk satu orang peserta didik yang memiliki kemampuan sangat rendah dan memiliki kecerdasan/bakat istimewa dengan siswa berkebutuhan lainnya.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Astuti (2011:145) tentang kegunaan program pembelajaran individual (PPI)

“PPI biasanya dibuat karena kemampuan siswa sangat jauh dari teman sekelasnya dan sulit mengikuti pembelajaran dengan kurikulum yang dimodifikasi.

Sedangkan di lapangan Guru Pembimbing Khusus tidak membuat PPI dikarenakan siswa berkebutuhan khusus masih bisa mengikuti pembelajaran menggunakan RPP dan Silabus modifikasi. Meskipun PPI tidak digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, Guru pembimbing khusus sebaiknya mengetahui cara membuat PPI tersebut sehingga ketika ada siswa berkebutuhan khusus yang diharuskan menggunakan PPI, GPK mampu membuatnya dengan cepat.

Dari beberapa uraian tentang temuan penelitian diatas, penulis berpendapat untuk langkah kedepannya dalam pembuatan RPP adalah sebaiknya pembuatan RPP lebih rinci lagi karena hanya digunakan satu atau dua kali pertemuan serta GPK sebaiknya pahan betul cara pembuatan PPI walau sementara ini belum ada siswa berkebutuhan khusus yang dianjurkan menggunakan PPI, namun bila nanti ada siswa berkebutuhan khusus membutuhkan PPI untuk membantu pembelajarannya, guru pembimbing khusus bisa cepat membuatnya sesuai kekhususan dan kelas siswa tersebut

2. Pelaksanaan pembelajaran

Dalam pembelajaran sekolah inklusi, guru pembimbing khusus dituntut mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip khusus terhadap siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan tingkat kekhususan peserta didik tersebut. Pada prakteknya di lapangan, guru pembimbing khusus telah melakukan proses pembelajaran dan telah menjalankan tugasnya sebagai pendamping siswa berkebutuhan khusus di kelas.

Senada dengan Direktorat PLB (2004) mengenai pembelajaran ramah pada sekolah inklusi pembelajaran yang dilaksanakan dalam seting inklusi, mengacu kepada pembelajaran yang ramah, maka guru-guru yang mengajar dalam seting inklusi, disamping menerapkan prinsip-prinsip umum pembelajaran, juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip khusus sesuai dengan gangguan yang dialami oleh masing-masing peserta didik.

Oleh karena itu dalam memberikan pembelajaran GPK harus memahami benar-benar kemampuan anak sesuai kekhususannya.

Dalam temuan di lapangan, guru pembimbing khusus memberikan pembelajaran di kelas, tentu ada tahapan-tahapannya, dari kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Tarmansyah (2007:198-200) tentang proses pelaksanaan pembelajaran siswa berkebutuhan khusus

Dimulai dari kegiatan awal, setelah guru pembimbing khusus merencanakan pembelajaran yang didasarkan atas asesmen terhadap peserta didik, selanjutnya guru pembimbing khusus menanyakan kepada peserta didik apa yang ingin dipelajari. Selain itu guru pembimbing khusus perlu untuk mengulang kembali materi sebelumnya secara singkat, kemudian kegiatan inti yang meliputi:

Uraian mengenai penjelasan konsep, prinsip dan prosedur yang akan dipelajari peserta didik. Guru pembimbing khusus menggunakan kegiatan yang bervariasi (kerja kelompok atau pasangan) dan memperkirakan waktu yang cukup kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas. Kemudian peserta didik latihan dalam menerapkan konsep, prinsip dan prosedur yang relevan dengan kehidupannya sehari-hari dan terakhir penutup yaitu guru pembimbing khusus memilih salah satu kegiatan pada akhir pelajaran misalnya diskusi menanyakan apa yang mereka pahami dari pembelajaran sebelumnya. Untuk mengetahui atau kemajuan belajar dilakukan umpan balik atau tes formatif dalam bentuk pertanyaan untuk dijawab. Apabila peserta didik telah mencapai hasil baik, maka guru pembimbing khusus meneruskan kepada pelajaran selanjutnya, namun bila peserta didik hasilnya kurang, harus mengulang isi pelajaran tersebut.

Lebih lanjut dengan apa yang dijabarkan oleh Direktorat PLB 2004, bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran, meliputi: a) Menyajikan materi-materi bahan pelajaran, b) Mengimplementasikan metode, sumber belajar dan bahan latihan sesuai dengan kemampuan awal peserta didik, c) Mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif, d) Mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran dan relevansinya dalam kehidupan, e) Mengelola waktu, ruang, bahan dan perlengkapan pembelajaran.

Dari uraian tentang temuan penelitian diatas, peneliti berpendapat untuk kedepannya dalam pelaksanaan pembelajaran, guru pembimbing khusus sebaiknya lebih sabar dalam mendampingi siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas serta lebih mengoptimalkan penggunaan media dalam

pembelajaran di kelas walau dengan jumlah media yang terbatas.

Evaluasi GPK terhadap siswa berkebutuhan khusus

Setelah tahap persiapan/perencanaan mulai dari pembuatan RPP, kemudian tahap pelaksanaan pembelajaran. Tahap terakhir adalah evaluasi GPK terhadap siswa berkebutuhan khusus. Tahap ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan.

Hal ini sejalan dengan penjabaran Direktorat PLB 2009 bahwa evaluasi adalah proses yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan atau prestasi yang dicapai oleh siswa berkebutuhan khusus setelah menjalani proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu di kelas inklusif.

Dalam temuan penelitian, evaluasi yang dilakukan oleh GPK terhadap siswa berkebutuhan khusus adalah GPK melakukan modifikasi sistem evaluasi terhadap siswa berkebutuhan khusus dengan bantuan guru kelas dan pelaporan hasil evaluasi terhadap siswa berkebutuhan khusus berupa rapot orange yang diberikan persemester.

Senada dengan penjabaran Direktorat PLB 2010, pelaksanaan evaluasi mencakup empat komponen sebagai berikut:

- 1) pengembangan alat/instrumen evaluasi, 2) cara pelaksanaan evaluasi, 3) penentuan keberhasilan dan 4) pelaporan hasil evaluasi. Untuk pengembangan alat/instrumen evaluasi, GPK memodifikasi penyusunan butir soal-soal. Misal: bagi siswa berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan kecerdasan (tunagrahita) menjalani ujian dengan menggunakan soal-soal yang disesuaikan dengan kemampuannya, sedangkan untuk anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan lain-lain umumnya menggunakan soal-soal ujian yang sama

sebagaimana soal-soal yang diperuntukkan bagi anak-anak lainnya.

Selanjutnya sejalan dengan penjelasan Direktorat PLB (2004), penilaian bisa dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui pengamatan selain itu penilaian bisa berdasarkan Ulangan harian, Ulangan tengah semester, dan selanjutnya tindak lanjut berupa pemberian raport terhadap siswa berkebutuhan khusus pada akhir semester dan penanganan terhadap siswa berkebutuhan khusus sesuai kekhususannya.

Dari uraian temuan tentang temuan penelitian diatas, peneliti berpendapat untuk kedepannya dalam mengevaluasi siswa berkebutuhan khusus, sebaiknya guru pembimbing khusus dan guru kelas lebih selektif dan adil dalam memberikan penilaian terhadap siswa, mempertimbangkan secara matang dalam meluluskan atau menaikkan kelas siswa serta selain pemberian raport sebaiknya pemberian hadiah terhadap siswa berkebutuhan yang berprestasi agar orangtua bangga dan siswa berkebutuhan khusus terpacu dalam meningkatkan prestasinya di dalam kelas.

(B) Peran Kepala sekolah dalam upaya peningkatan manajemen sekolah inklusi di SDN Babatan V Surabaya.

1. Administrator sekolah inklusi

Dalam manajemen sekolah inklusi, keberadaan kepala sekolah sangat penting, mengingat sekolah inklusi harus dipimpin oleh Kepala sekolah yang lebih memahami tentang manajemen sekolah inklusi

Hal ini sejalan dengan PP No 28 Tahun 1990 Pasal 12 ayat 1 (Budiyanto,2005:195), secara intern kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan administrasi, pembinaan

tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana prasarana.

Senada dengan apa yang dikemukakan Rossow (Astuti,2011:49), dengan bahwa kepala sekolah di sekolah inklusi sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan inklusi dan disiplin ilmu pendidikan kebutuhan khusus, sehingga aktifitas yang dijalankan sebagai kepala sekolah benar-benar berakar dari filosofi pendidikan inklusi.

Sejalan dengan penjelasan Maulyono (2008:143), bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan ruh pusat sumber gerak organisasi untuk mencapai tujuan.

Kemudian diperjelas oleh Tarmansyah (2007:148), Kepala sekolah berfungsi sebagai pengendali mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Temuan penelitian peran kepala sekolah dalam upaya meningkatkan manajemen sekolah inklusi sebagai administrator adalah kepala sekolah mampu menjalin hubungan yang baik/harmonis terhadap semua tenaga kependidikan selain itu kepala sekolah mampu membagi tugas tenaga kependidikan sesuai jabatannya,

Sesuai dengan Mulyasa (2005:107) bahwa Kepala sekolah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kegiatan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program sekolah, yang meliputi: administrasi kurikulum, sarana prasarana, peserta didik, keuangan dan hubungan masyarakat.

Kemudian juga sejalan dengan penjelasan Ngalmi (2007:106), kepala sekolah sebagai administrator pendidikan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan pendidikan pengajaran di sekolah.

Selanjutnya serupa dengan penjabaran Sagala (2010:124), kepala sekolah sebagai

administrator dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya akan tampak berhasil jika ia mampu membedakan seluruh personel sekolah sesuai tugas pokok fungsinya dengan landasan profesional ke arah pencapaian tujuan organisasi secara berkualitas.

Dari penjabaran tersebut dapat dipahami bahwa kemampuan kepala sekolah sangat penting guna tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam temuan penelitian ini, tentang peran kepala sekolah sebagai administrator sekolah inklusi di SD Negeri Babatan V Surabaya adalah kepala sekolah menguasai perannya dalam kegiatan administrasi serta kepala sekolah mampu membagi tugas tenaga kependidikan sesuai bagian atau jabatannya

Uraian tentang temuan penelitian diatas, penulis berpendapat untuk langkah kedepannya, kepala sekolah sebagai administrator sekolah inklusi sebaiknya lebih intensif menjalin hubungan baik dengan semua tenaga kependidikan dan lebih transparan dalam membagi-bagikan tugas tenaga pendidikan sehingga dapat terperinci secara jelas.

2. Supervisor dalam pembuatan administrasi guru

Mengenai peran kepala sekolah sebagai supervisor di lapangan adalah kepala sekolah memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap guru mengenai pembuatan administrasi setiap bulannya.

Pada temuan penelitian, Kepala sekolah memberikan supervisi dengan menggunakan pembicaraan individual terhadap guru selain itu kepala sekolah berupaya meningkatkan pembinaan profesi melalui menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi.

Serupa dengan penjabaran Mulyasa (2005:111) kepala sekolah sebagai supervisor adalah memberikan pengarahan, pengawasan dan

pengendalian terhadap guru untuk meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan keterampilannya dalam melaksanakan tugas. Kepala sekolah telah melakukan bimbingan terhadap guru setiap bulannya dan evaluasi setiap tahunnya.

Selanjutnya sejalan dengan apa yang dikemukakan Sagala (2010:137), Kepala sekolah sebagai supervisor adalah membantu dan memfasilitasi guru dalam melakukan proses pembelajaran dan melakukan penilaian menggunakan teknik-teknik supervisi sesuai kebutuhan.

Berdasarkan temuan penelitian di atas mengenai peran kepala sekolah dalam upaya peningkatan manajemen sekolah inklusi di SD Negeri Babatan V Surabaya, peneliti berpendapat bahwa kepala sekolah sebaiknya memberikan supervisi terkadang melalui diskusi kelompok, kunjungan dan simulasi pembelajaran tidak hanya memberikan supervisi dengan pembicaraan individual saja selain itu sebaiknya kepala sekolah lebih memperluas kerjasama profesi guru tidak hanya dengan perguruan tinggi.

PENUTUP

Simpulan

1. Dari pembinaan profesi GPK dapat dilihat perubahannya diantaranya pada pembuatan RPP, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi GPK terhadap siswa berkebutuhan khusus
 - a. Pembuatan RPP adalah salah satu tahap persiapan atau perencanaan sebelum guru memberikan pembelajaran di kelas dibuat untuk satu atau dua kali pertemuan dan GPK tidak membuat PPI untuk siswa berkebutuhan khusus, karena belum ada siswa berkebutuhan khusus yang diharuskan menggunakan PPI.
 - b. Pelaksanaan pembelajaran adalah proses guru memberikan program pembelajaran atau

penyampaian materi terhadap siswa berkebutuhan khusus di kelas konseling maupun di kelas reguler dengan menggunakan bantuan media yang bertujuan agar siswa mencapai kompetensi yang diharapkan.

c. Evaluasi GPK terhadap siswa berkebutuhan khusus adalah pemberian nilai oleh GPK dengan bantuan guru kelas terhadap siswa berkebutuhan khusus yang lebih mengarah pada perkembangan perilaku, kedisiplinan dan partisipasi dalam kegiatan pembelajaran secara tertulis maupun melalui pengamatan dan pelaporan hasil evaluasi berupa pemberian raport orange pada akhir semester.

2. Peran Kepala sekolah dalam upaya peningkatan manajemen sekolah inklusi adalah kemampuan yang dimiliki kepala sekolah melalui peran-perannya diantaranya sebagai administrator dan supervisor untuk pencapaian tujuan sekolah inklusi yang diharapkan.

a. Kepala sekolah sebagai administrator sekolah inklusi adalah penanggungjawab dalam program pelaksanaan atau administrasi sekolah inklusi, diantaranya: kegiatan mengatur: a) Kesiswaan, b) Kurikulum, c) Ketenagaan, d) Sarana prasarana, e) Keuangan, f) Hubungan dengan masyarakat, g) Kegiatan belajar mengajar.

b. Kepala sekolah sebagai supervisor pembuatan administrasi guru adalah pengendali, pengawas, pembimbing terhadap guru setiap bulannya serta memfasilitasi guru untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan keterampilannya dalam melakukan proses pembelajaran.

Saran

Saran-saran yang dikemukakan dalam penelitian ini ditujukan kepada:

1. Kepala sekolah SDN Babatan V Surabaya

Kepala sekolah sebaiknya lebih intensif menjalin hubungan baik dengan semua tenaga kependidikan, lebih transparan dalam membagi-bagikan tugas tenaga pendidikan dan kepala sekolah sebaiknya lebih memperluas kerjasama dengan pihak lain, sehingga tidak hanya kerjasama dengan perguruan tinggi

2. Guru pembimbing khusus

Guru pembimbing khusus sebaiknya lebih aktif dalam mendampingi siswa berkebutuhan khusus, lebih optimal menggunakan RPP, silabus dan media dalam memberikan pembelajaran dan GPK sebaiknya lebih selektif dalam memberikan nilai terhadap siswa berkebutuhan khusus

3. Pemerintah

Pemerintah perlu memperhatikan pengadaan pelatihan-pelatihan dan pendidikan terhadap guru pembimbing khusus yang tidak berstatus pendidikan khusus

4. Peneliti lain

Bagi peneliti lain diharapkan menjadi referensi dan informasi dalam melakukan penelitian di bidang yang sama tentang manajemen sekolah inklusi dan semoga dijadikan bahan pustaka dalam mengerjakan laporan atau penelitian-penelitian yang relevan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Idayu. 2011. *Pakem Sekolah Inklusi*. Malang: Bayumedia Publishing
- Bafadal, Ibrahim. 2006. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Bogdan, Robert C. 2006. *Qualitative research for education an introduction to theory and methods*. United states of Amerika : Syaracuse University.
- Budiyanto, 2005. *Pengantar Pendidikan Inklusi Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta: Dit PPTK & KPT

- Depdiknas. 2009. *Modul Training of Trainers Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktur Pembinaan SLB.
- Depdiknas, 2010. *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktur Pembinaan SLB
- Direktorat PLB, 2007. Pedoman khusus manajemen sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif (Online), (<http://Blog.tp.ac.id> diakses 14 April 2013).
- Direktorat PLB, 2007. Pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif (Online), (<http://Blog.tp.ac.id> diakses 15 Juni 2013).
- Direktorat PLB, 2007. Pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif pengadaan dan pembinaan tenaga pendidik pendidik (Online), (<http://Blog.tp.ac.id> diakses 15 Juni 2013).
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi
- Handoko, Hani. 2011. *Manajemen Personalial dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Husnan, Suad. 2002. *Manajemen Personalial*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Ishartiwi. 2010. Implementasi pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dalam sistem persekolahan nasional. *Jurnal Pendidikan Khusus (Online)*. Vol.6 No.1, Universitas Negeri Yogyakarta, (<http://adgi.ac.id> diakses 14 April 2013).
- Lidya Maftukhah Nur. 2009. *Manajemen pembelajaran inklusi (studi kasus di SD Negeri Sumpersari 1 Malang)*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang : Universitas Negeri Malang.
- Loreman, Tim dkk. 2005. *Inclusive education:a practical guide to supporting diversity in the classroom*. Australia: Agency Limited (CAL).
- Moleong. Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mudjito, 2011. *Pendidikan Inklusif: Beberapa Implikasi Terhadap Pengelolaan Sekolah dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta : Depdiknas.
- Mudjito, dkk, 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Badouse Media Jakarta.
- Mudjito, 2012. *Masa Depan Pendidikan Inklusif*. Jakarta:Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar.
- Mulyasa, E. 2005. *Menjadi Kepala Sekolah yang profesional dalam konteks menyusun MBS dan KBK*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Ngalm, Purwnto. 2007. *Kepemimpinan kepala sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pratiningrum. 2010. Fenomena penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus (online)* Vol.7 No. 2, Universitas Negeri Yogyakarta, (<http://Journal.uny.ac.id>, diakses 8 april 2013).
- Rivai, Veithzal. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan dari teori ke praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Riyanto, Yatim. 2007. *Metodologi penelitian pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Unesa press Surabaya
- Sagala, Syaiful. 2009. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sofyandi, Herman. 2008. *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Subekhi, Akhmad. 2012. Jauhar, Mohammad. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarwanto, 2004. *Inclusive educaton in Indonesia : Lessons from Japanese Special Education Models*. Tsukuba : CRICED University of Tsukuba.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sumadi. 2010. Analisis manajemen personalia pada sekolah dasar inklusi Binaan Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen Pendidikan* Vol. 1 No.1 87-106 ISSN 2087-1805. Universitas Negeri Surabaya
- Tarmansyah. 2007. *Pendidikan Inklusi Untuk Semua*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Tarmansyah. 2009. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif SD Negeri 03 Alai Pandang Utara Kota Padang (Studi Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Ujicoba Sistem Pendidikan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, (Online)*, Vol XI No. 1 Universitas Negeri Padang,

(<http://ejournal.unp.ac.id>, diakses 8 April 2013).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (online). (<http://aliusmanhs.wordpress.com>, diakses 27 Maret 2013).

Wrastari. 2013. Sikap guru terhadap pendidikan inklusi ditinjau dari faktor pembentuk sikap. *Fakultas Psikologi Perkembangan dan Pendidikan (Online) Vol.2 No.1 Universitas Airlangga Surabaya*, (<http://journal.unair.ac.id>, diakses 8 juni 2013)

